



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN MALILI



2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

LAKIP adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

LAKIP Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Malili dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Malili selama Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Malili serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) di Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa LAKIP Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna, untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan

Malili, 24 Februari 2024

CAMAT MALILI

NASIR, SP., M.Si

NIP. 198508072010011015

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Malili selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Malili diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Malili menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.1 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kecamatan Malili 830,379 km² atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili terdiri dari 14 (Empatbelas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan, dengan 52 dusun/lingkungan dan 139 RT. Adapun Desa/Kelurahan dimaksud masing-masing :

1. Kelurahan Malili
2. Desa Baruga
3. Desa Balantang
4. Desa Wewangriu
5. Desa Laskap
6. Desa Pongkeru
7. Desa Harapan
8. Desa Pasi-pasi
9. Desa Puncak Indah
10. Desa Ussu
11. Desa Atue
12. Desa Manurung
13. Desa Tarabbi
14. Lakawali
15. Lakawali Pantai

Jumlah Penduduk Kecamatan Malili pada tahun 2024 sebanyak 45.853 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2024) dengan rincian : laki-laki sebanyak 23.712 jiwa dan perempuan sebanyak 22.141 jiwa. Penduduk Kecamatan Malili merupakan penduduk yang heterogen baik Suku maupun Agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Malili yaitu Suku Jawa, Bali, Lombok, Batak, Bugis, Toraja, Pamona dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

1.2 Data Umum Organisasi

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Malili per tanggal 31 Desember 2024 adalah 15 (empat belas) orang PNS dan 14 (empat belas) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	1	1	-	-	2
2	Golongan III	2	3	3	2	10
3	Golongan II	-	-	-	2	2
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	PPPK					1
JUMLAH		3	4	3	4	15

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	1	1	-	-	2
2	Golongan III	-	8	-	2	10
3	Golongan II	-	-	-	2	2
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	PPPK			1		1
JUMLAH		1	9	1	4	15

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	7	1	6	14
2	Fungsional	-	-	-	1	1
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	7	1	7	15

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

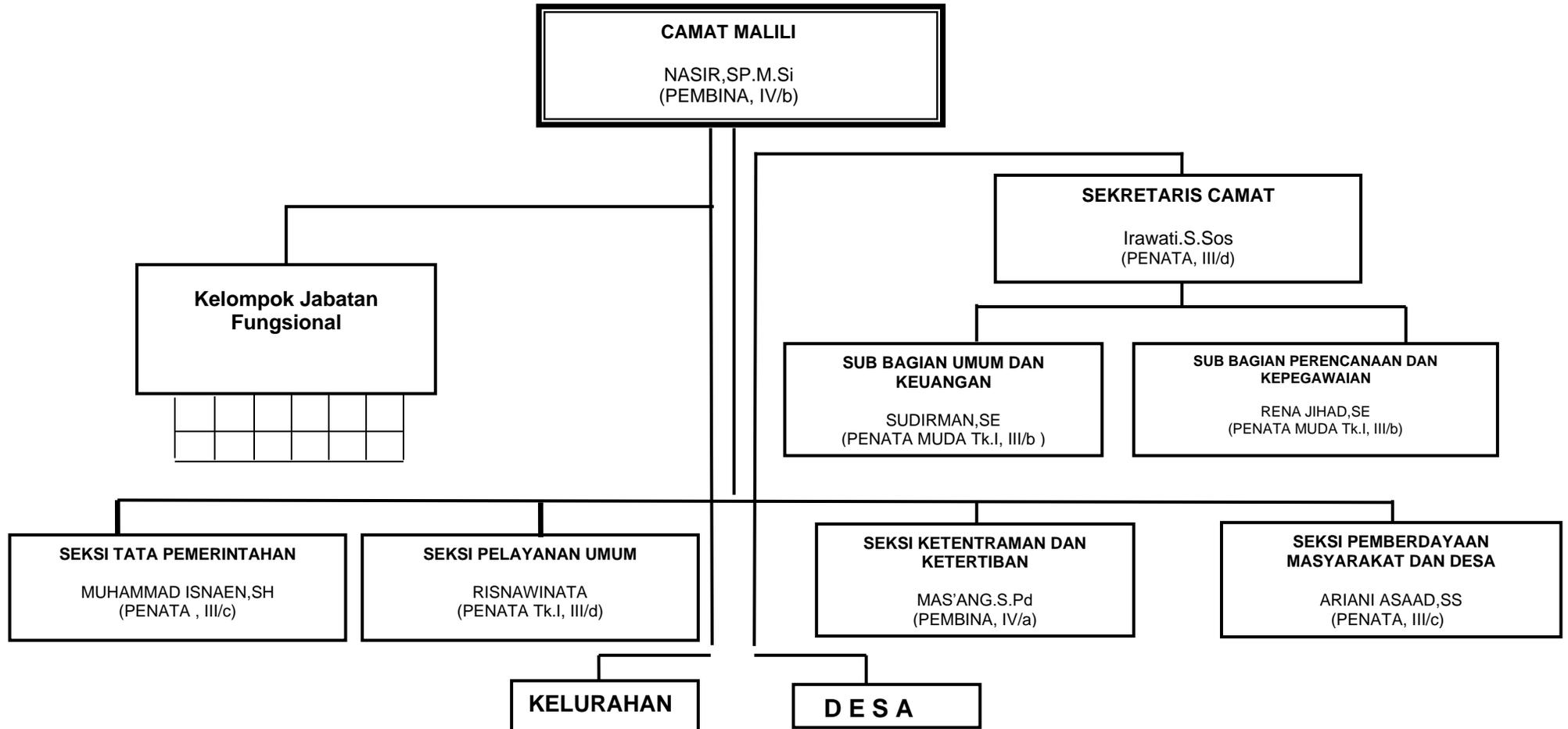
Tabel 1.4
Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	14
2	CPNS	-
3	PTT	-
4	PPPK	1
5	UPAH JASA	14
JUMLAH		29

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.3. Struktur/Kondisi Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN MALILI



1.4. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.5. Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Malili tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Malili yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Malili Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Malili.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

❖ **Visi dan Misi**

Pada dasarnya, rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Malili sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

***“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai
Agama dan Budaya”***

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kecamatan Malili menyusun Perjanjian Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Malili Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Renja Tahun 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024. Kecamatan Malili telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Survei Kepuasan Masyarakat	93,05
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Nilai LAKIP	66

NO	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.002.116.211	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.271.900	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 336.840.350	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 14.088.150	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 62.445.839	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 20.666.500	APBD

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tabel 2.2
APBD Perubahan Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4.271.900
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	4.271.900
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	4 Laporan	4.271.900
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	328.980.350
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	86.575.750
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	39.125.750
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	47.450.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	242.404.600
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	242.404.600
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	14.859.150
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	100%	14.088.150

dan Ketertiban Umum		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	11.476.400
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	2.611.750
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	4.771.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4.771.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	56.045.839
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	56.045.839
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Dokumen	56.045.839
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	20.666.500
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	20.666.500
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	20.666.500

Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.773.172.811
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	39.030.850
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	26.598.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.487.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.582.200
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.363.450
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.270.635.062
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	21 Orang	2.238.233.182
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	32.401.880
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	20.076.020
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	20.076.020
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	3.000.000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	3.000.000

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Administrasi Perangkat	100%	62.252.119
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Dokumen	10.702.119
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		5 Orang	51.550.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	573.545.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15 Paket	9.485.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		15 Paket	63.618.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		200 Paket	11.429.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8 Dokumen	9.900.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	130.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 laporan	349.112.100
Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	116.580.000
Pengadaan Mebel		2 Unit	17.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 Unit	99.080.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	546.188.660
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	19.508.660
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 laporan	98.880.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	427.800.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	141.865.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	32.615.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	17.750.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	91.500.000
JUMLAH	100%	4.445.199.950

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Malili

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Pemerintah Kecamatan Malili yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026

KANTOR KECAMATAN MALILI

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$\text{Survey Kepuasan Masyarakat Penimbang} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai}$	Kuisisioner	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Pelayanan Umum
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Nilai Lakip	Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Laporan Kegiatan	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Pelayanan Umum, Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Subbagian Umum dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026

KANTOR KECAMATAN MALILI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Transisi 2021	TARGET					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Malili	Tingkat pertumbuhan IKM			92	92.7	92.9	93.05	93.10	94	94
2			Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	92.27	93.00	93.05	94	94.5	94.5
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan	Nilai LAKIP Kecamatan			60.18	65.5	65.15	66	67	72	72
			Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1. Capaian IKU Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pencapaian terhadap IKU Kantor Kecamatan Malili akan digambarkan per Sasaran Strategis, sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Malili sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan public di tingkat kecamatan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,05	93.06	100,01%	Tinggi

Sumber :Seksi Pelayanan Umum

$$\text{Rumus : \% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

a. Analisis Capaian kinerja sasaran pertama sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian mencapai 100,01% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah baik. Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan Tahun 2024 Kecamatan Malili berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan menggunakan kuesioner yang mengajukan permohonan pelayanan yang dibagikan pada setiap pengunjung yang datang pada loket pelayanan Kecamatan Malili, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target 93,05 atau melampaui target dengan nilai survei 93.06 (daftar terlampir). Sasaran pertama yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Malili.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

1) Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur kualitas sarana dan prasarana dengan nilai **878**.

❖ **Faktor penghambat** kenapa kecamatan Malili pada unsur kualitas sarana dan prasarana mendapat nilai paling rendah disebabkan karena kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta berkualitas.

❖ **Solusi** untuk permasalahan unsur kualitas sarana dan prasarana adalah dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan layak agar tercipta kepuasan masyarakat yang lebih baik

2) Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada unsur penanganan pengaduan pengguna pelayanan dengan nilai **1036**.

❖ **Faktor pendukung** Kecamatan Malili pada unsur penanganan pengaduan pengguna pelayanan mendapat nilai tinggi, disebabkan karena memang pelayanan di kantor kecamatan malili menggunakan prosedur tatacara pelayanan dimana setiap pengaduan masyarakat dicatat dalam register pengaduan dan kemudian segera meneruskan ke pimpinan

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

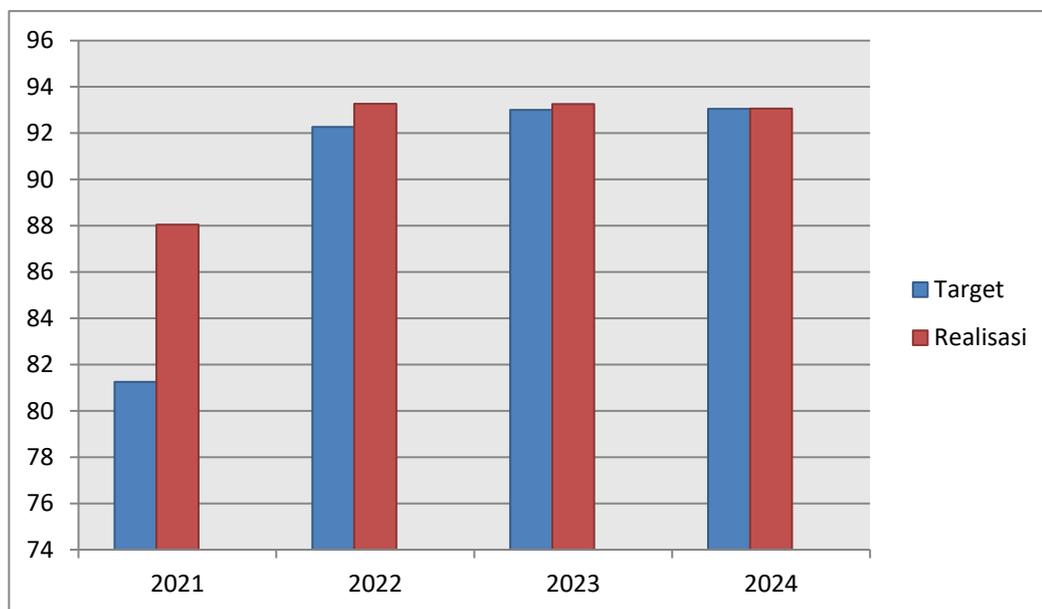
Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat
2		2021	81.25	88.05	Tinggi
3		2022	92.27	93.26	Tinggi
4		2023	93.00	93.27	Tinggi
5		2024	93.05	93.06	Tinggi

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

GRAFIK TARGET DAN REALISASI IKM



Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Pada setiap tahunnya realisasi Survei Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditentukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan 2024 Terhadap Target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2024	2024	
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Indeks Kepuasan Masyarakat	93.05	93.06	94,5

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Dengan melihat table capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi hingga tahun 2024 sebesar 93,06 atau setara dengan 100,01% dengan Predikat Tinggi, Target nilai IKM pada akhir periode Resntra 2021-2026 yaitu 94.5, jika Realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2024 adalah 98,5%. Target ditahun 2024 memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Malili untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Malili dapat terwujud.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan.

Adapun hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Keterbatasan SDM dimana tidak semua pegawai di kantor camat malili memahami prosedur pelayanan
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, kondisi kantor yang ruangnya terbatas dimana dalam satu ruangan digabung beberapa seksi didalamnya sehingga pelayanan sedikit terganggu

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Malili dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu:

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelayanan umum di kecamatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan umum di kecamatan meliputi pelayanan perizinan dan non-perizinan seperti pelayanan penerbitan KTP, KK, Pembuatan surat Keterangan pindah keluar/datang, surat rekomendasi kegiatan, surat pemberitahuan pelaksanaan penelitian, legalisasi surat-surat keterangan dll.

❖ **Hambatan :**

- Kualitas SDM Aparatur masih kurang
- Kurangnya motivasi, semangat kerja serta profesionalisme pegawai yang ada di bagian pelayanan
- System strategi pelayanan yang belum optimal

❖ **Solusi :**

- Perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi, kualitas dan inovasi pelayanan
- Menyelenggarakan administrasi pelayanan terpadu
- Perlu pengembangan website kecamatan yang menyediakan formular layanan online

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Koordianasi kegiatan pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Musrenbang Kecamatan Malili dilaksanakan pada Bulan Maret 2024, Kegiatan Musrenbang memberikan ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk pembangunan yang melibatkan Tokoh masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Musrenbang Kec.Malili tahun 2024 dihadiri 15 Lembaga Kemasyarakatan sesuai target yang direncanakan

❖ Hambatan :

- Pemahaman masyarakat tentang skala prioritas pembangunan masih rendah
- Faktor pekerjaan Masyarakat yang banyak menyita waktu sehingga masih kurangnya peserta musrenbang
- Sistem informasi musrenbang yang masih kurang

❖ Solusi :

- Dilakukan sosialisasi cara menyusun skala prioritas
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat atas pentingnya keterlibatan dalam pembangunan
- Memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses musrenbang
- Mengakomodir berbagai kelompok dan kepentingan masyarakat

b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PKK pada 14 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Malili. Kegiatan PKK untuk tingkat Kecamatan yaitu :

- a) Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan;
- b) Memfasilitasi Program / Kegiatan PKK Desa/Kelurahan;
- c) Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh PKK Desa/Kelurahan.

Sepanjang tahun 2024 PKK kecamatan Malili melakukan beberapa kegiatan diantaranya Lomba Kampung Organik, Lomba Dasawisma dan Lomba Posyandu terintegrasi. Kegiatan PKK pada Tahun 2024 sebagian besar berkaitan dengan penertiban administrasi PKK Desa/Kelurahan dan beberapa perlombaan baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

❖ **Hambatan :**

- Keterbatasan anggaran di Desa untuk mengembangkan keterampilan anggota PKK Desa
- Terkenadala pada pemasaran produk PKK

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan bimbingan teknis bagi pengurus PKK untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan malili pada tahun 2024 yaitu pelatihan kader posyandu Kelurahan Malili, Pelatihan Kader

Lansia Kelurahan Malili serta Peningkatan Aparatur Satlinmas.

Posyandu lansia merupakan wadah kegiatan kesehatan untuk warga lanjut usia (60 tahun ke atas). Tujuannya adalah memberikan pelayanan kesehatan terhadap lansia yang sehat maupun lansia dengan risiko tinggi terhadap suatu penyakit. Untuk Peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dilakukan melalui pelatihan, dan peningkatan gaji. Peningkatan kapasitas ini bertujuan agar Satlinmas dapat menjalankan tugasnya dengan baik

❖ **Hambatan :**

- Masih kurangnya motivasi kader posyandu untuk mengajak Masyarakat datang ke posyandu
- Kurangnya sarana prasarana, seperti alat timbang dan peralatan imunisasi
- Kurangnya kesadaran Lansia untuk mengikuti posyandu lansia
- Kurangnya fasilitas yang memadai khusus posyandu lansia

❖ **Solusi :**

- Memberikan dukungan dan motivasi kepada kader posyandu dengan melakukan kegiatan studi tiru dan pelatihan kader posyandu
- Melakukan sosialisasi mengenai program posyandu lansia kepada Masyarakat
- Menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Forkopimcam merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan. Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimca dilaksanakan lintas sektor se-Kecamatan Malili. Berikut adalah beberapa hal yang dibahas dalam rapat Forkopimca Tahun 2024 :

- a) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait peningkatan mutu dan pelayanan Kesehatan termasuk penanganan stunting di Kecamatan Malili
- b) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Malili
- c) Persiapan dan pengamanan Pilkada serta sinergitas untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai
- d) Rapat Koordinasi Forkopimca membahas tentang koordinasi penanganan konflik social

❖ **Hambatan :**

- Kurangnya komunikasi yang terkadang menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat rapat forkopimca
- Keterlambatan kegiatan yang sering mengganggu jadwal forum sehingga tidak efektif
- Kurangnya persiapan dari peserta terkadang menjadi penyebab diskusi yang tidak efektif

❖ **Solusi:**

- Komunikasi yang efektif kepada peserta dengan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti dan pahami
- Diperlukan jadwal yang jelas dan memastikan semua peserta mengetahui jadwal forum
- Dijadwalkan sejauh mungkin agar ada persiapan yang matang dari peserta forum untuk membahas pokok permasalahan dalam forum

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi, rekomendasi dan koordianasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebelum dicairkan, APBDes diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Evaluasi kecamatan lalu dibuatkan surat pengantar untuk dapat di teruskan dan diverifikasi kembali oleh Dinas PMD. Setiap Desa mengajukan Peraturan yang telah dibuat kepada Camat Malili untuk mendapatkan rekomendasi pencairan APBDes. Pencairan APBDes dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun anggaran.

❖ **Hambatan :**

- Keterlambatan Informasi terkait aturan penyusunan APBDes.
- Peraturan Bupati terkait pagu indikatif terlambat ditetapkan.
- Belum adanya peningkatan kapasitas SDM di kecamatan terkait kegiatan perencanaan desa.

❖ **Solusi :**

- Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait.
- Menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya.
- Pengusulan kegiatan bimbingan teknis perencanaan APBDes kepada SKPD terkait.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal untuk mewujudkan masyarakat aman dan tentram di wilayah kecamatan malili, kerjasama ini tidak hanya pada bidang keamanan namun juga bidang-bidang lain dalam mengawal program pemerintah

❖ **Hambatan :**

- Kurangnya pemahaman masyarakat sehingga masih ada hewan peliharaan yang berkeliaran
- Masih tingginya kenakalan remaja terutama anak sekolah

❖ **Solusi :**

- Melakukan sosialisasi di masyarakat terkait perda hewan ternak
- Melakukan pendekatan dengan remaja di sekolah-sekolah melalui kegiatan sosialisasi dengan bekerjasama dengan pihak sekolah

b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Target dalam sub kegiatan ini adalah melakukan pertemuan dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan untuk menjalin informasi dalam upaya pencegahan pelanggaran dan norma norma ditengah masyarakat kecamatan malili. Kecamatan Malili

melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.

❖ **Hambatan :**

- Masih rendahnya sikap toleransi Masyarakat serta adanya sikap fanatisme berlebihan terhadap agama sendiri
- Masih ada Sebagian masyarakat yang sering mengklaim kebenaran sepihak dan selalu memaksakan kehendak
- Adanya kepentingan politik yang digunakan untuk menunggangi agama
- Adanya perbedaan sudut pandang dan pemikiran dalam Masyarakat serta berkembangnya aliran ekstrim dalam beragama

❖ **Solusi :**

- Melakukan sosialisasi di masyarakat terkait semangat gotong royong, memberikan cara pandang yang modern dalam praktik beragama, serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa membedakan agama dan tanpa adanya diskriminasi

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Target dalam sub kegiatan ini adalah koordinasi/sinergitas dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kecamatan malili melakukan pertemuan dengan polri, TNI, Satpol PP dalam rangka penegakan perda yang ada untuk menata dan mengatur tatanan sehingga terwujud kenyamanan dan keindahan di wilayah kecamatan malili

❖ **Hambatan :**

- Masih kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap Perda-perda yang berlaku
- Adanya kebijakan yang tumpah tindih dan sering berubah
- Sistem penegakan yang perlu mengalami perbaharuan

❖ **Solusi :**

- Memperbaharui system penegakan
- Melakukan Kerjasama yang baik atau melibatkan kontribusi dari pihak lain dalam hal ini Masyarakat yang ada demi kelancaran penegakan perda

Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Malili, kaitannya dengan Pelaksanaan Tata Pemerintahan dilingkup kecamatan.

Sebagai catatan untuk Nilai SAKIP sampai saat laporan ini disusun, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur belum mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2024, sehubungan hal tersebut maka pengukuran capaian Indikator Kinerja ini masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2022	Capaian 2024
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kecamatan Malili	Nilai LAKIP	65.15	68.15	66 (B)	-	101%	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

a. Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk tahun 2024 belum dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk tahun 2023 nilai LAKIP Kecamatan Malili adalah 66 (B) dari target 65,15 ini berarti bahwa nilai evaluasi sakisip baik dan tercapai, akan tetapi perlu untuk ditingkatkan.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini

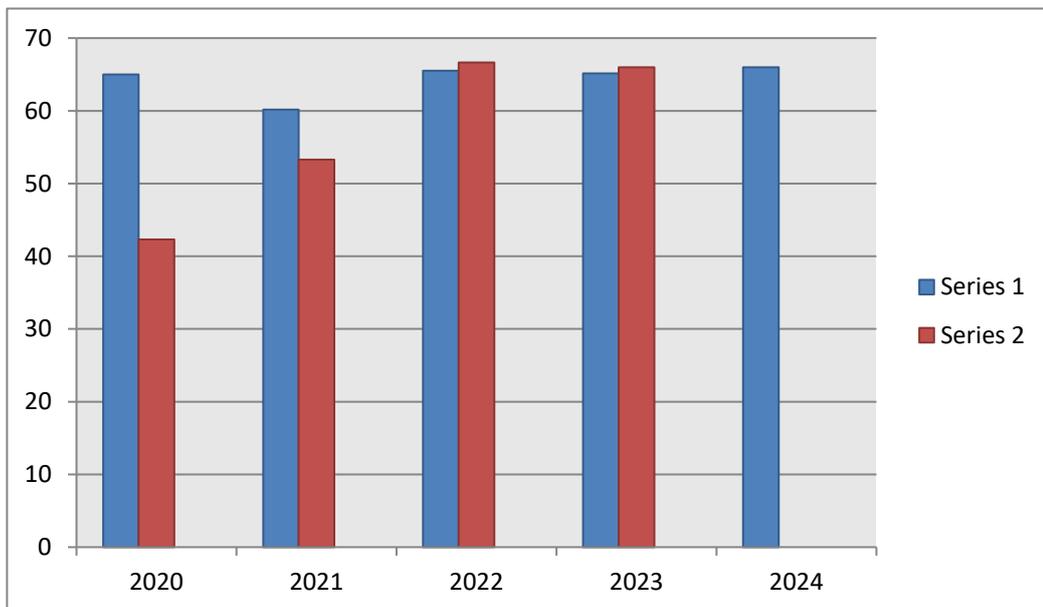
Tabel 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1		2020	65	42.31	65.9%	Kurang
2		2021	60.18	53.28	88.33%	Cukup
3		2022	65.5	66.65	101.76%	Baik
4		2023	65.15	66	101	Baik
5		2024	66	-	-	-

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

GRAFIK TARGET DAN REALISASI NILAI LAKIP



Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2020 sampai tahun 2024 bahwa pada Tahun 2020 mengalami penurunan dengan memperoleh nilai 42,31 dengan kategori D. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dengan nilai 53.28 dengan Kategori CC. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan nilai 66,65 dengan kategori B dan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai 66 dengan Kategori B sehingga dapat disimpulkan, perolehan nilai LAKIP kantor Kecamatan Malili mengalami penurunan dan

peningkatan pada setiap tahunnya sehingga akan dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai lakip.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2023		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Malili	Nilai Score LAKIP (n-1)	65.15	66 (B)	72

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu Skor LAKIP 66 dengan kategori B. Nilai SAKIP yang diraih Tahun 2023 ini menunjukkan hasil yang baik karna mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian indikator tersebut yaitu :

- a. Kurangnya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana kerja yang ditetapkan

- b. Kurangnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan
- c. Kurangnya koordinasi dalam upaya mendapatkan target capaian kinerja
- d. Keterbatasan kemampuan SDM di Bidang Akuntabilitas kinerja

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Jabatan	Hasil Analisis Jabatan		Kondisi saat ini		
		Struktural	Pelaksana	Struktural	Pelaksana	
					PNS	Non PNS
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-
3	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	4	1	-	-
4	Kasubag Umum dan Keuangan	1	4	1	2	1
5	Kasi Pemerintahan Umum	1	3	1	1	2
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	3	1	1	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	5	1	1	2
8	Kasi Pelayanan Umum	1	3	1	1	1
JUMLAH		8	22	8	6	7
TOTAL		30		21		

Sumber : Dokumen ANJAB dan ABK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan syarat pemangku jabatan pelaksana pada Kantor Kecamatan Malili belum sesuai dengan hasil analisis jabatan Kecamatan Malili yang dibuat oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Luwu Timur karena sebagian jabatan pelaksana masih diisi oleh Non PNS (tenaga upah jasa).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Malili adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang disusun oleh Kantor kecamatan Malili, diantaranya adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan.

❖ Hambatan :

- Keterbatasan data dan informasi dari masing-masing sub bagian dan kepala seksi yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga seringkali penyusunan dokumen perencanaan mengalami keterlambatan.
- Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

❖ Solusi:

- Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait dalam hal ini masing-masing Seksi dan Sub Bagian.

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen RKA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Malili, diantaranya adalah RKA-SKPD Pokok dan RKA-SKPD Perubahan.

b. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen DPA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen DPA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Malili, diantaranya adalah DPA-SKPD Pokok dan DPA-SKPD Perubahan.

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterlambatan pengumpulan data untuk bahan LAKIP dari Kepala Seksi.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu : Menekankan kepada kepala seksi untuk segera menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di kantor kecamatan Malili sebanyak 22 orang. Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di kantor Kecamatan Malili.

b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Target dalam subkegiatan ini adalah penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran kantor kecamatan malili. Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target dari sub kegiatan ini adalah barang yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja di kantor kecamatan Malili dilaksanakan dengan persentase 100%.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
- Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.

4) Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Target dari sub kegiatan ini adalah laporan data administrasi kepegawaian. Tidak di temukan masalah didalam pelaksanaan sub kegiatan ini.
- b. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran ASN dalam melengkapi administrasi kepegawaiannya

❖ Solusi

Melakukan tertib administrasi terhadap dokumen-dokumen ASN setiap triwulan

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- b. Penyediaan bahan logistic kantor
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi kunjungan tamu;
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Untuk belanja surat kabar yang disediakan hanya berapa jenis akan tetapi masih ada beberapa koran

lokal yang harus di bayarkan pada momen tertentu atau perayaan-perayaan besar

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- Selalu memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder.

❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya

Target dari sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor demi kelancaran tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan. Tidak di temukan masalah didalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Untuk penyediaan jasa komponen instalasi Listrik dan air anggarannya tidak tetap dikarenakan jumlah yang dibayarkan bervariasi
- Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.

2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
 - Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.
- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu pada umumnya kegiatan yang ada pada program Penunjang Urusan Permerintah Daerah berjalan dengan baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp.4.445.199.950,- Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.4.286.256.962,- dengan capaian **96.42%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET TRIWULAN I, II, III, IV <i>(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)</i>	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2024	Capaian (%)
			(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
				(6/5*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	4.002.116.211	3.873.911.617	96.80
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.030.850	36.179.990	92.70
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.598.200	24.179.450	90.91
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.487.000	4.425.000	98.62
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.582.200	4.268.840	93.16
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.363.450	3.306.450	98.31
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.469.446.462	2.390.852.874	96.82
	- Penyediaan Gaji dan tujangan ASN	2.437.044.582	2.359.685.294	96.83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.401.880	31.167.580	96.19
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	20.076.020	19.675.100	98.00

	Daerah			
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.076.020	19.675.100	98.00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100.00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.000.000	3.000.000	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.422.119	55.071.030	72.06
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.702.119	9.808.630	91.65
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.720.000	45.262.400	68.87
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	637.632.100	624.171.617	97.89
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.485.300	9.324.000	98.30
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,618,100	58.351.000	91.72
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.429.600	6.529.500	57.13
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.900.000	9.840.000	99.39
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	135.500.000	135.301.000	99.85
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.669.100	404.826.117	99.30
	Penyediaan Jasa Penunjang	504.063.660	494.666.632	98.14

	Urusan Pemerintah Daerah			
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.508.660	17.688.264	90.67
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.255.000	81.678.368	91.51
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.300.000	395.300.000	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.865.000	122.564.374	98.95
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.615.000	38.711.124	97.72
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.750.000	17.505.000	98.62
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.500.000	66.348.250	99.77
	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.271.900	3.684.405	86.25
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.271.900	3.684.405	86.25
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.271.900	3.684.405	86.25
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	336.840.350	310.808.400	92.27

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	94.435.750	78.910.000	83.56
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39.125.750	32.085.200	82.01
	- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.310.000	46.824.800	84.66
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	242.404.600	231.898.400	95.67
	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	242.404.600	231.898.400	95.67
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.859.150	16.499.520	87.49
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	14.088.150	11.728.520	83.25
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.476.400	10.528.520	91.74
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.611.750	1.200.000	45.95
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.771.000	4.771.000	100.00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	4.771.000	4.771.000	100.00

	Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62.445.839	61.919.020	99.16
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	62.445.839	61.919.020	99.16
	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	62.445.839	61.919.020	99.16
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.666.500	19.434.000	94.04
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	20.666.500	19.434.000	94.04
	- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	20.666.500	19.434.000	94.04
	TOTAL BELANJA	4.445.199.950	4.286.256.962	96.42

3.3. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) pada Tahun 2023 di tuangkan dalam matriks tidak lanjut sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progres penyelesaian
1.	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu setelah diformalkan	Telah diinformasikan ke bagian PPID Kecamatan agar segera mempublis setelah Lakip disusun dan di tandatangi oleh Camat	Akan diroses oleh admin PPID
2	Agar menyusun jadwal monitoring	Telah dilaksanakan monitoring setiap triwulan akan tetapi blm ada jadwal tetap yang dibuat	Monev minggu kedua setelah triwulan berakhir
3	Agar menjelaskan definisi operasional	Belum dibuat penjelasan tersebut	Selanjutnya akan ditindaklanjuti
4	Agar menselaraskan PK dengan Pohon Kinerja	Belum dilakukan karena belum memahami teknis penyusunannya	Akan ditindaklanjuti segera
5	Agar melengkapi perjanjian kinerja dengan CSF serta jelaskan kondisi yang diinginkan	Telah melakukan perbaikan pada Perjanjian Kinerja akan tetapi belum membuat CSF dikarenakan belum memahami teknis penyusunan CSF	Selanjutnya akan ditindaklanjuti segera
6	Gambarkan secara jelas hubungan rencana strategis dan misi dalam renstra	Akan dilakukan perbaikan pada saat penyusunan renstra yang terbaru	Akan ditindaklanjuti oleh kasubag perencana
7	Sesuaikan SKP dengan Pohon Kinerja	Telah dilakukan penyesuaian pada saat penginputan RHK SKP Tahun berikutnya	Ditindaklanjuti oleh masing-masing pejabat eselon

8	Membuat Perkada tentang TPP, Mekanisme Pembayaran TPP (Aplikasi)	Perkada TPP diterbitkan oleh bagian Organisasi dan menjadi acuan di Kecamatan Malili begitupun dengan mekanisme pembayaran TPP melalui aplikasi	Telah ditindaklanjuti di sub bagian Keuangan
9	Agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja	Telah disampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua pegawai di kantor kecamatan malili untuk menjadi perhatian bersama	Membuat PK serta laporan capaian kinerja setiap bulan
10	Agar setiap seksi dan sub bagian membuat laporan kinerja yang memuat terkait capaian kinerja yang telah diperjanjikan, faktor pendukung dan penghambat, dan evesiensi yang dilakukan selanjutnya dievaluasi secara berjenjang dan disampaikan kepada sub bagian perencana untuk disusun menjadi Lakip Unit Kerja	Telah dilakukan evaluasi berjenjang serta pelaporan kinerja	Masing-masing Seksi dan Kasubag telah membuat Laporan Evaluasi setiap triwulan yang kemudian di evaluasi
11	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja yang memadai	Telah ditindaklanjuti dan di jelaskan dalam laporan evaluasi triwulan serta Lakip	Membuat Laporan Evaluasi kinerja triwulan dan Lakip
12	Agar Informasi dalam Laporan Kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Telah ditindaklanjuti	Masing2 Kasi/kasubag membuat laporan evaluasi kinerja sesuai
13	Agar melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai pada unit kerja dokumen Lakip sehingga mereka memahami informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh	Untuk sosialisasi belum dilakukan akan tetapi Dokumen Lakip yang disusun serta hasil LHE Lakip di infokan ke seluruh pegawai pada	Akan dilakukan sosialisasi selanjutnya

	pegawai dari level eselon III sampai pada level staf	kantor kecamatan melalui grup whatsapp kantor kecamatan	
14	Hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Ditindaklanjuti dalam hal menjadikan pedoman dalam pencapaian target kinerja setiap pelaksanaan kegiatan di kantor camat	Seluruh pejabat eselon melaksanakan kegiatan telah melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Malili Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malili Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Malili Tahun 2024 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 93,06 dari target 93,05 Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Nilai LAKIP belum bisa digambarkan capaiannya disebabkan penilaian LAKIP untuk Tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024. Pada tahun 2024 Kecamatan Malili telah menggunakan Anggaran Belanja sebesar Rp. 4.445.199.950 dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.286.256.962 atau setara dengan 96,42% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Malili telah optimal.

Pada tahun 2024 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Malili dalam upaya pencapaian sasaran yang dikategorikan belum berhasil antara lain :

1. Kurangnya kompetensi SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga beban kerja menumpuk di beberapa orang saja
 2. Keterbatasan data. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
 3. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum sesuai dengan definisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP). Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.
 4. Pengembangan kelembagaan pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada masa-masa tertentu saja selama kegiatan itu berjalan (ada anggaran).
- ❖ Langkah Antisipatif :
1. Menyusun perbaikan instrumen evaluasi khususnya pelayanan publik agar dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi terkini
 2. Terus melakukan monitoring dan evaluasi atas program yang berjalan, agar program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang diharapkan;
 3. Melakukan review terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, agar capaian yang telah dihasilkan pada Tahun 2024 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan perjanjian kinerja Tahun 2025;

4. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
5. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
6. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
8. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimtek/diklat.
9. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
10. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Malili, 24 Februari 2025

CAMAT MALILI

NASIR, SP.M.Si

NIP. 198111162010011015

LAMPIRAN – LAMPIRAN

i. DAFTAR PENGELOLAAN SURVEI KEPUASAN